

Peranan Otonomi Khusus Dalam Pemerataan Pembangunan Di Provinsi Papua

Yuniar Sri Hartati*

* Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 11 Desember 2025
Disetujui 16 Januari 2026

Keywords:

Otonomi Khusus,
Pemerataan Pembangunan,
Konvergensi.

ABSTRAK

Abstract : This research was conducted with the following objectives: 1) To determine the magnitude of the level of growth inequality (convergence) between regions in Papua Province; 2) To find out the role of the special autonomy fund in influencing the level of growth inequality (convergence) in Papua Province. This research is also expected to be theoretically useful that can enrich and complement the treasures of science in terms of Regional Autonomy and equitable development so that it can be useful for academics, practitioners and bureaucrats. The methodology in this study is a qualitative study, using panel data regression analysis methods, data in the form of time series and cross sections using the Fixed Effects (FE) model in 29 districts/cities in Papua Province. The results obtained were that Model 1A (with Covid-19) acceleration convergence of -2,966 with Model 1B (without Covid-19) convergence speed of -2,789 indicates absolute convergence, because the coefficient \ln_PDRB per capita is negative and significant. When the special autonomy fund was included, the results obtained were model 2A (with Covid-19) with a convergence speed of -3,510 with Model 2B (without Covid-19) a convergence speed of -2,521, showing a negative and significant coefficient of \ln_PDRB per capita. With the provision of special autonomy funds, regions with lower GDP per capita tend to grow faster and special autonomy funds have an influence on economic growth of 0.0296.

Abstrak : Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pertumbuhan (konvergensi) antar wilayah di Provinsi Papua; 2) Untuk mengetahui besarnya peranan dana otonomi khusus dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan pertumbuhan (konvergensi) di Provinsi Papua. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara teoritis yang dapat memperkaya dan melengkapi khasanah ilmu pengetahuan di dalam hal Otonomi Daerah dan pemerataan pembangunan sehingga dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi dan birokrasi. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode analisis regresi data panel, data dalam bentuk *time series* dan *cross section* menggunakan model *Fixed Effects (FE)* pada 29 Kab/Kota di Provinsi Papua. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Model 1A (dengan Covid-19) percepatan konvergensi sebesar -2.966 dengan Model 1B (tanpa Covid-19) kecepatan konvergensi -2.789 menunjukkan adanya konvergensi absolut, karena koefisien \ln_PDRB per kapita negatif dan signifikan. Ketika dana otonomi khusus di masukkan maka hasil yang diperoleh adalah model 2A (dengan Covid-19) kecepatan konvergensi sebesar -3.510 dengan Model 2B (tanpa Covid-19) kecepatan konvergensi sebesar -2.521, menunjukkan koefisien negatif dan signifikan pada \ln_PDRB per kapita. Dengan adanya pemberian dana otonomi khusus, daerah-daerah dengan PDRB per kapita lebih rendah cenderung akan tumbuh lebih cepat dan dana otonomi khusus memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 0.0296.

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Alamat Korespondensi :

Yuniar Sri Hartati,
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : tanthisoelarso@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan nasional juga merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan harapan pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan menjadi salah satu tujuan utama upaya pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Dan agar terjadinya pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur sendiri pembangunan daerahnya yang dikenal dengan nama otonomi daerah. Dari otonomi daerah tersebut pemerintah memberikan kekhususan tersendiri kepada beberapa daerah yang salah satunya adalah Provinsi Papua.

Kekhususan dalam otonomi daerah kepada Provinsi Papua dikenal dengan nama Otonomi Khusus Provinsi Papua diberikan dengan harapandapat menjadi sarana percepatan pembangunan di tanah Papua sehingga dapat sejajar dengan daerah lain di Indonesia mengingat secara geografis dan politis Papua bisa dikatakan sebagai wilayah yang masih tertinggal. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah pusat memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan otonomi khusus yang dikenal dengan sebutan dana otonomi khusus (dana otsus).

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008, diamanatkan bahwa kebijakan pembagian dana dalam rangka otonomi khusus adalah sebagai berikut: 1). Dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dalam pengelolaanya ada kewajiban untuk melakukan alokasi pembiayaan di bidang pendidikan sebesar 30%, bidang kesehatan sebesar 15%, bidang ekonomi kerakyatan sebesar 20%, bidang infrastruktur dasar 20%; 2). Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan berdasarkan usulan Provinsi. Dana ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selama tahun 2002-2021 tercatat bahwa dana otonomi khusus yang telah diterima Provinsi Papua menembus angka Rp. 99,58 triliun, yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 75,53 Triliun dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp 24,04 Triliun. Besarnya dana yang diberikan tersebut diharapkan dapat membantu pembangunan di Provinsi Papua agar Provinsi Papua dapat terlepas dari ketertinggalan, keterbelakangan dan ketimpangan pembangunan. Akan tetapi pada kenyataannya Provinsi Papua masih mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1). pertumbuhan ekonomi daerah, 2). tingkat pendapatan perkapita penduduk yang masih rendah,3). Indeks Pembangunan Manusia yang ada, 4). Indeks ketimpangan pembangunan daerah, yang semuanya itu tidak sebanding dengan penerimaan dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat.

Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua yang jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai gambar berikut :



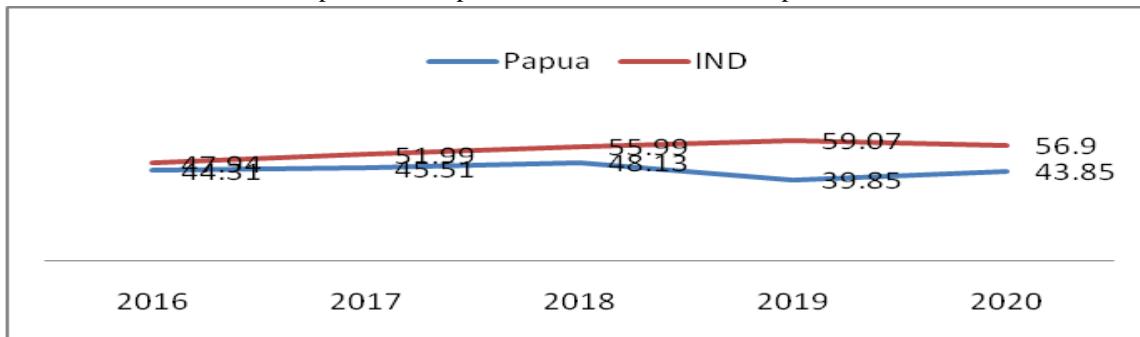
Data BPS Provinsi Papua, 2025

Publikasi BPS tahun 2021 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dari tahun 2016 - 2020 yang mengalami sedikit kenaikan akan tetapi sangat drastis penurunnya, perubahan yang sangat drastis terjadi di tahun 2019 dimana penurunannya hingga mencapai -15,75% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 7,32%. Dan di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebesar 2,32 persen. Hal yang berbeda dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang nilainya cenderung sama pada tingkatan 5% - 5,17%.

Yang kedua, Pendapatan per kapita penduduk yang dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang di suatu daerah dan juga untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.

Berdasarkan data BPS, Provinsi Papua antara tahun 2016 – 2020, menunjukan bahwa Provinsi Papua mengalami penurunan Pendapatan Per Kapita di tahun 2019 sebesar Rp. 39,85 juta dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 48,13 juta. Sedangkan secara nasional di tahun yang sama malah mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar Rp. 55,99 Juta menjadi Rp. 59,07 juta di tahun 2019.

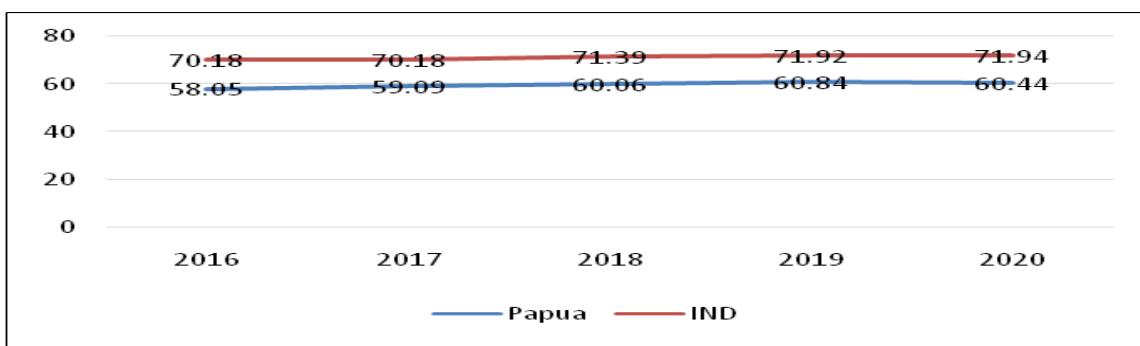
Gambar 2 Pendapatan Per Kapita Indonesia dan Provinsi Papua Tahun 2016 – 2020



Data BPS Provinsi Papua, 2025

Yang ketiga, besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua sesuai publikasi BPS tahun 2021 tercatat besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sebesar 71,94 persen yang termasuk dalam kategori tinggi. Namun hal ini tidak diikuti oleh Provinsi Papua yang memiliki IPM sebesar 60,44 termasuk dalam kategori sedang dan berada diurutan terbawah capian IPM provinsi di Indonesia.

Gambar 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Papua, 2016 – 2020

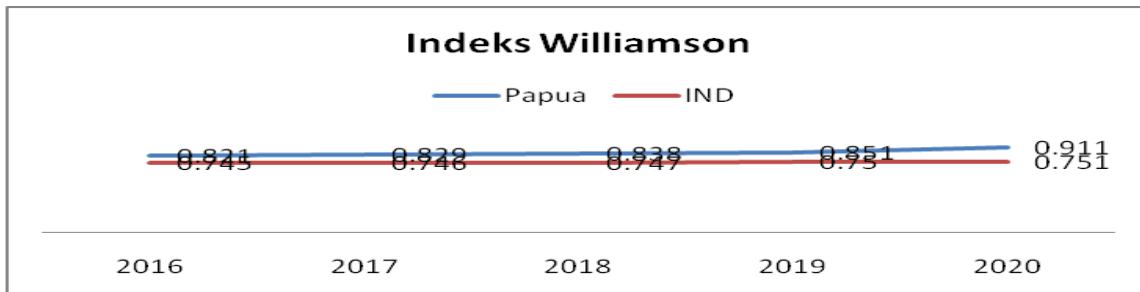


Data BPS Provinsi Papua, 2025

Yang keempat, besarnya tingkat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua. Ketimpangan ekonomi dan pembangunan dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin meningkat, hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat pembangunan yang membawa dampak pada perbedaan tingkat kesenjangan-kesenjangan antar daerah.

Dan jika pelaksanaan pembangunan ekonomi yang tidak merata akan menyebabkan terjadinya ketimpangan perekonomian antar wilayah. Ketidakmerataan dan ketimpangan yang terjadi lebih tergambar melalui Indeks Williamson dimana semakin mendekati angka 0 maka tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah semakin rendah dan jika mendekati angka 1 maka tingkat ketimpangan pembangunan semakin tinggi. Selama 5 tahun (2016 – 2020), besarnya tingkat ketimpangan wilayah yang terjadi di Provinsi Papua jika dibandingkan dengan ketimpangan tingkat Nasional sangatlah jauh perbedaannya. Ketimpangan pembangunan Provinsi Papua sebesar 0,95 persen jika dibandingkan dengan ketimpangan di Nasional yang hanya sebesar 0,75 persen.

Gambar 4 Indeks Ketimpangan Pembangunan Indonesia dan Provinsi Papua
Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS data diolah, 2025

Dari uraian di atas, menjadikan alasan perlu dilakukannya analisis yang mengidentifikasi apakah dengan adanya dana otonomi khusus memiliki peranan dalam mengatasi ketimpangan regional antar daerah yang juga pengaruh terhadap munculnya konvergensi atau divergen dalam pertumbuhannya. Sehingga hal tersebutlah yang mendasari penulis melakukan penelitian dengan judul: "Peranan Otonomi Khusus Dalam Pemerataan Pembangunan Di Provinsi Papua."

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi (konvergensi) antar wilayah di Provinsi Papua. 2) untuk menganalisis besarnya peranan dana otonomi khusus terhadap PDRB dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi (konvergensi/divergensi) antar wilayah di Provinsi Papua.

Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Pendapatan Per Kapita

Menurut Tristanto, dkk(2013), Pendapatan perkapita adalah besarnya semua pendapatan dan semua jumlah penduduk di suatu wilayah negara negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan perkapita memperlihatkan pula apakah kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut.

Manfaat perhitungan pendapatan perkapita sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, pendapatan per kapita dihitung secara berkala, biasanya 1 tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita antara lain sebagai berikut (Alam, 2007:50) :

- a. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.
- b. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain.
- c. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya.
- d. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil lahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi.

Menurut Rasyidi (2010:166), Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perkapita adalah sebagai berikut :

1. Permintaan agrerat dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah seluruh barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam tingkat harga.
2. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam satu tahun. Sedangkan tabungan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Tabungan, konsumsi, dan pendapatan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat *Keynes* yang dikenal dengan *psychological consumption* yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan, dimana semakin besar konsumsi dan tabungan maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh oleh seseorang.
3. Investasi Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting pengeluaran agrerat.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

Teori pertumbuhan Neo klasik, dari Robert Solow, menjelaskan terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi, kemajuan yang disebabkan oleh cara-cara baru dan lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti: cara menanam padi, membuat pakaian dan sebagainya. Dengan klasifikasi kemajuan teknologi tersebut yaitu hemat tenaga kerja dan hemat modal.

Teori neo klasik memiliki pandangan dari sudut yang berbeda dari teori klasik yaitu dari segi penawaran. Pertumbuhan ekonomi ini bergantung kepada fungsi produksi, dengan persamaan :

dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah angkatan kerja yang bekerja dan T adalah teknologi. Karena tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen maka model neo klasik Solow juga disebut model pertumbuhan eksogen. Model Solow memiliki beberapa kekurangan dan untuk memperbaikinya dengan memecah total faktor produksi dengan memasukan variabel lain, dimana variabel ini dapat menjelaskan pertumbuhan yang terjadi. Model ini disebut model pertumbuhan endogen.

Model Solow menerangkan hubungan modal dan angkatan kerja yang bekerja saja, sehingga ditambahkan lagi variabel mutu modal manusia untuk membantu menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi selain modal dan angkatan kerja yang bekerja, yaitu :

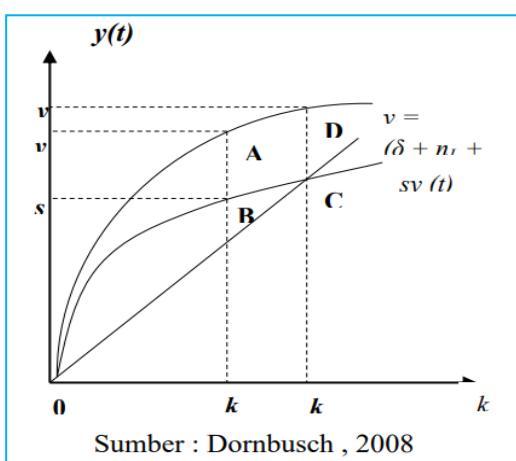
dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, T adalah teknologi dan H adalah modal manusia.

Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan ekonomi Klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengkerjaan penuh (*full Employment*) dan tingkat pemanfaatan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya, dengan rasio modal-output (*capital-output ratio*) yang dapat berubah-ubah. Hal ini mampu menghasilkan sejumlah output tertentu yang dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Modal yang lebih banyak digunakan maka akan menggunakan tenaga kerja yang besar pula. Oleh karena itu perekonomian secara tidak langsung memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

Model Pertumbuhan Solow mempunyai dua implikasi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Implikasi jangka pendek dari Model Pertumbuhan Solow adalah ukuran kebijakan seperti pemotongan pajak, subsidi untuk investasi dapat berdampak pada tingkat *steady state* dari output tetapi tidak berdampak terhadap laju pertumbuhan jangka panjang. Implikasi selanjutnya adalah pertumbuhan hanya merupakan dampak pada jangka pendek sebagai konvergensi ekonomi kepada tingkat *steady state* yang baru dan konvergensi tersebut ditentukan oleh akumulasi modal.

Pada jangka panjang, laju pertumbuhan ditentukan oleh variabel yang berada di luar Model Solow. Prediksi pada umumnya terhadap model ini bahwa ekonomi akan selalu terkonvergen pada laju pertumbuhan *steady state*, yang mana hanya tergantung pada perkembangan teknologi dan laju pertumbuhan angkatan kerja. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, akumulasi modal akan kurang signifikan dibandingkan dengan inovasi teknologi. Berdasarkan asumsi dan properti tersebut, Model Solow dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5 Output dan Investasi Pada Kondisi *Steady State*



Model pertumbuhan Solow memperlihatkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Seperti halnya kebanyakan model pertumbuhan lainnya, model Solow juga menganggap bahwa penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan peranan penting dalam suatu perekonomian. Secara teoritis, penawaran barang didasarkan pada fungsi produksi yang menyatakan bahwa persediaan output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. Modal dalam bentuk investasi akan diperoleh dari tabungan. Tabungan yang tinggi juga bukan suatu hal yang bagus jika tidak diinvestasikan. Tugas pembuat kebijakan adalah menetapkan tingkat tabungan yang ideal atau tingkat

kondisi mapan dalam perekonomian. Tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu. Oleh karena individu umumnya hanya peduli pada konsumsi (bukan pada modal dan jumlah output), maka seorang pembuat kebijakan yang jeli akan memilih kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tertinggi. Nilai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi inilah yang disebut tingkat modal kaidah emas (*Golden Rule Level of Capital*) (Mankiw, 2000).

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmita (2014 : 91), dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah: a) Ketidakseimbangan Pendapatan; b) Perubahan Struktur

Perekonomian; c) Pertumbuhan Kesempatan Kerja; d) Tingkat dan Penyebaran Kemudahan; e) Produk Domestik Regional Bruto.

Ketimpangan Antar Wilayah (Disparitas Regional)

Disparitas regional atau ketimpangan wilayah merupakan permasalahan yang selalu timbul dalam pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan Sumber Daya Alam ataupun Sumber Daya Manusia serta infrastruktur tiap daerah.

Pembangunan ekonomi regional, Williamson (1965) menyatakan bahwa pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar apabila pembangunan hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu atau daerah maju saja. Pada tahap yang lebih maju, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa keseimbangan antar daerah yang maju ataupun yang terbelakang dengan signifikan.

Pembangunan regional yang berimbang merupakan sebuah pertumbuhan yang merata dari wilayah yang berbeda untuk meningkatkan pertumbuhan kapabilitas dan kebutuhan mereka. Hal ini tidak selalu berarti bahwa semua wilayah harus mempunyai perkembangan, tingkat industrialisasi, pola ekonomi, atau mempunyai kebutuhan pembangunan yang sama. Akan tetapi yang lebih penting adalah adanya pertumbuhan yang seoptimal mungkin dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, diharapkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan hasil dari sumbangsih interaksi yang saling memperkuat di antara semua wilayah yang terlibat.

Ketidakseimbangan pembangunan menghasilkan struktur hubungan antar wilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah mengakibatkan kemiskinan di wilayah perdesaan yang akhirnya mendorong terjadinya “urbanisasi” yang luar biasa sehingga perkotaan mengalami bentuk ketidakefisienan dan muncullah permasalahan misal kawasan kumuh, tingginya tingkat polusi, kemacetan, kriminalitas, dan sebagainya yang pada akhirnya menjadikan kota sarat dengan permasalahan-permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang semakin kompleks dan sulit untuk diatasi. Belum lagi dengan adanya kewenangan yang lebih pada pemerintah daerah didalam pengelolaan daerahnya yang melahirkan “ego-regional” berupa “keengganan” melakukan berbagai bentuk kerjasama antar wilayah

Menurut hipotesa Neo-Klasik, dalam proses pembangunan awalnya ketimpangan akan meningkat, proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan masih terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun. Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang sudah maju.

Disparitas antar wilayah juga diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang menekankan pertumbuhan ekonomi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang ekstrim. Selain itu akibat *trickle down effect* yang tidak terjadi secara efektif dan justru *backwash effect* yang mengakibatkan eksplotasi sumberdaya secara berlebihan dari wilayah hinterland. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan regional di daerah terjadinya karena: a) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah; b) Alokasi Investasi; c) Tingkat Mobilitas Faktor produksi yang Rendah antar Wilayah; d) Perbedaan Sumber Daya Alam antar Wilayah; e) Perbedaan Kondisi Demografis antar Wilayah; f) Kurang Lancarnya Perdagangan antar Wilayah.

Konvergensi Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan neoklasik yang diinisiasi oleh Robert Solow mengasumsikan adanya *diminishing return* dari pertumbuhan modal dan adanya *constant return to scale*. Sehingga, berdasarkan konsep neoklasik, pertumbuhan pada akhirnya akan mencapai kondisi *steady state* dan akan tercipta konvergensi pertumbuhan ekonomi di setiap negara atau daerah. Di negara dengan kondisi *steady state* tambahan modal tidak lagi berguna karena akan menyebabkan rasio modal per tenaga kerja semakin besar sehingga malah menurunkan *return* atas modal.

Menurut Barro & Sala-i-Martin (1992) mengartikan konvergensi sebagai adanya tendensi wilayah-wilayah tertinggal mengejar ketertinggalannya (*catching up effect*) dari wilayah kaya karena pertumbuhan ekonomi mereka sangat mengagumkan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara maju akan mengalami kondisi *steady state*, yaitu negara yang tingkat pendapatannya tidak dapat meningkat lagi karena tambahan investasi tidak menambah pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena seluruh biaya produksi sudah tertutupi oleh investasi yang ada, sehingga tambahan tabungan (*saving*) di negara tersebut tidak dapat dijadikan tambahan investasi. Barro & Sala-i-Martin membagi konvergensi menjadi dua hipotesa, yaitu:

1. Konvergensi Mutlak (*Absolute Convergence*). *Absolute convergence* sendiri dikatakan terjadi ketika terdapat hubungan negatif antara PDRB per kapita awal dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita selama periode yang diteliti. Konsep konvergensi absolut digunakan untuk menguji hipotesis pada model

pertumbuhan neoklasik bahwa wilayah yang miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada wilayah yang kaya, tanpa mensyaratkan karakteristik perekonomian lainnya (Barro & Sala-iMartin, 1992). Konsep beta absolut terjadi apabila estimasi terhadap β_1 adalah signifikan dan bernilai negatif.

Untuk melihat konsep konvergensi absolut tersebut, dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{1}{T} \ln \frac{(y_{i,t_0} + T)}{(y_{i,t_0})} = \beta_0 + \beta_1 \ln y_{i,t_0} + \epsilon_i$$

Keterangan:

$$\frac{1}{T} \ln \frac{(y_{i,t_0} + T)}{(y_{i,t_0})} = \text{Pertumbuhan pendapatan perkapita per tahun pada tahun akhir } t$$

y_{i,t_0} = Pendapatan perkapita awal di kab./kota i

i, t = Kab./Kota dan jumlah than dalam periode observasi

$\beta_0 + \beta_1$ = Parameter yang diestimasi

ϵ_i = error yang terdistribusi secara normal dan independen

2. Konvergensi Kondisional (*Conditional Convergence*). Konvergensi kondisional (Barro & Sala-i-Martin) adalah konvergensi yang dilakukan dengan melihat perilaku dan karakteristik antarnegara atau antardaerah dalam suatu negara. Perbedaan antarnegara adalah terbukti dan eksis. Konvergensi dikatakan kondisional apabila tingkat pertumbuhan lebih tinggi pada provinsi yang memiliki level pendapatan yang lebih rendah.

Untuk melihat konsep konvergensi kondisional/bersyarat tersebut, dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{1}{T} \ln \frac{(y_{i,t_0} + T)}{(y_{i,t_0})} = \beta_0 + \alpha_0 \ln y_{i,t_0} + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \ln y_{i,1} X_{1it} + \ln y_{i,2} X_{2it} \dots n + \epsilon_i$$

Keterangan:

$$\frac{1}{T} \ln \frac{(y_{i,t_0} + T)}{(y_{i,t_0})} = \text{Pertumbuhan PDRB perkapita per tahun pada tahun akhir } t$$

α_0 = tingkat konverensi

$y_{i,t}$ = Pendapatan perkapita tahun t setiap kab./kota

y_{i,t_0} = Pendapatan per kapita awal t_0 setiap kab./kota

β = Konstanta

α = Koefisien regresi

ϵ_i = error term

X_{it} = variabel yang diduga mempengaruhi konvergensi pertumbuhan ekonomi

Otonomi Khusus

Kebijakan tentang otonomi daerah, memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Otonomi khusus berarti hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah ditentukan berbeda dengan daerah pada umumnya. Otonomi diberikan kepada daerah sebagai kesatuan hukum, bukan kepada pemerintah daerah. Otonomi khusus berbeda dengan daerah khusus karena di dalam otonomi khusus perbedaan dengan daerah lain bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, melainkan juga meliputi perbedaan ruang lingkup hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah, serta pola dan proporsi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah khusus.

Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Papua juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatarbelakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting.

Pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya undang-undang tersebut terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan.

Hubungan keuangan pusat dan daerah dimanapun dipandang sangat menentukan kemandirian otonomi. Tetapi yang umum dipersoalkan adalah “minimnya” jumlah uang yang ‘dimiliki’ daerah dibandingkan dengan yang ‘dimiliki’ pusat. Berdasarkan premis ini maka inti hubungan keuangan Pusat dan Daerah adalah “perimbangan keuangan” (Manan, 2001: 40).

Pemberian Dana Otonomi Khusus diantaranya digunakan untuk pembangunan adalah merupakan indikator utama diterbitkannya regulasi otonomi khusus. Kebijakan otonomi khusus juga diterbitkan dalam rangka mengejar ketertinggalan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatanagar sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Potensi sumber daya alam yang melimpah dan diiringi dengan kualitas ekonomi, SDM dan infrastruktur yang sangat rendah maka kebijakan otonomi khusus dipandang sangat penting bagi kemajuan pembangunan daerah.

Metodologi Dan Data (*Methodology And Data*)

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metoda statistika.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data yang diperoleh bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang digunakan adalah pendapatan per kapita kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua (X1), penerimaan dana otonomi khusus (Otsus) kabupaten/kota di Provinsi Papua (X2) dan tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Papua (Y/g) pada kurun waktu 2010 - 2021. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel yang terdiri dari data *time series* selama 12 tahun (t = 12) yakni dari tahun 2010-2021, sedangkan data *cross section* dalam penelitian ini adalah 29 daerah Kab/Kota yang ada di Provinsi Papua (n = 29), sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 348 data. Perhitungan dan analisis dilakukan dengan membedakan antara kondisi dengan pandemi Covid-19 (kondisi khusus) yaitu dari tahun 2010-2021 dan kondisi tanpa pandemi Covid-19 (kondisi umum) yaitu dari tahun 2010-2019.

Dalam analisis regresi data panel, dilakukan percobaan mengestimasi model *Pooled OLS (Ordinary Least Squares)*, *Fixed Effects (FE)*, dan *Random Effects (RE)*, yaitu dari Uji Chow (*Chow Test*) dan Uji Hausman (*Hausman Test*). Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan rumus menghitung :

- 1) untuk menjawab pertanyaan berapa besar tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi (konvergensi) antar wilayah di Provinsi Papua, menggunakan analisis terjadinya konvergensi beta absolut sebagai berikut: $\ln g = \beta_0 + \beta_1 \ln y_{i,t-1} + \varepsilon_i$
- 2) Untuk menjawab pertanyaan berapa besar peranan dana otonomi khusus dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi (konvergensi) di Provinsi Papua, digunakan perhitungan Konvergensi Kondisional dengan rumus sebagai berikut: $\ln g = \beta_0 + \beta_1 \ln y_{i,t-1} + \beta_2 \ln \frac{\text{Dana Otsus}}{\text{PDRB}} + \varepsilon_i$

Hasil Dan Pembahasan (*Result And Discussion*)

Hasil Penelitian

Setelah dilakukan uji penentuan model maka didapatkan hasil bahwa model uji yang dipakai adalah model *Hausman Test*. Dari hasil estimasi *Hausman Test*, nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0.0001 lebih kecil dari *alpha* 5% sehingga H0 ditolak dan model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Setelah itu dilakukan uji perbandingan model antara Model 1A (kondisi khusus/kondisi dengan adanya Covid-19) dengan Model 1B (kondisi normal/kondisi tanpa adanya Covid-19) untuk melihat apakah ada perbedaan dari kedua kondisi tersebut. Setelah dilakukan uji perbandingan model maka diperoleh hasil bahwa terdapatnya perbedaan dari kedua kondisi tersebut, sehingga dapat dilakukan perhitungan perbedaan antara kedua kondisi dengan menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil perhitungan menunjukkan nilai *Prob>chi²* (0.0642) lebih kecil dari 0.10 tetapi lebih besar dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa signifikansi terjadi pada level 10%, yang sering dianggap sebagai *"marginally significant"* atau *"weakly significant"* dalam analisis statistik.

Dari hasil analisis di atas, maka disimpulkan bahwa penelitian ini akan dilakukan dengan membedakan analisis kondisi yaitu kondisi dengan adanya Covid-19 dan kondisi tanpa Covid-19.

Tabel 1 Hasil Perhitungan *Fixed Effect Model* Konvergensi Model 1A dan 1B Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010 – 2021

Variables	Konvergensi Absolut		Konvergensi dengan Dana Otsus	
	Model 1A	Model 1B	Model 2A	Model 2B
	(Dengan Covid-19)	(Tanpa Covid-19)	(Dengan Covid-19)	(Tanpa Covid-19)
ln_PDRB per kapita	-2.966***	-2.789***	-3.510***	-2.521***
Dana Otsus			0.0296***	-0.0123
Constant	55.82***	53.65***	62.40***	50.29***
Observations	308	252	308	252
R-squared	0.133	0.151	0.163	0.155

Sumber: Data diolah, 2025

1) Hasil perhitungan untuk model konvergensi absolut menunjukkan perbedaan menarik antara kondisi dengan Covid-19 (Model 1A) dan tanpa Covid-19 (Model 1B). Kedua model menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara ln PDRB Per Kapita dan variabel dependen, yang mengindikasikan adanya konvergensi ekonomi.

Koefisien ln PDRB Per Kapita pada Model 1A (-2.966) lebih besar secara absolut dibandingkan Model 1B (-2.789), ini menunjukkan bahwa laju konvergensi sedikit lebih cepat dalam kondisi dengan Covid-19 yang mengindikasikan bahwa pandemi telah mempercepat proses penyesuaian ekonomi antar daerah.

2) Kedua model menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara logaritma natural PDRB per kapita dan variabel dependen, dengan koefisien yang lebih besar dalam model yang mencakup dengan Covid-19 (-3.510) dibandingkan dengan tanpa Covid-19 (-2.521). Ini mungkin mengindikasikan bahwa pandemi telah memperkuat efek konvergensi.

Dana Otonomi Khusus menunjukkan perbedaan menarik antara kedua model; dalam Model 2A, variabel ini memiliki efek positif dan signifikan (0.0296), sementara dalam Model 2B efeknya negatif dan tidak signifikan (-0.0123). Hal ini menyiratkan bahwa selama pandemi, Dana Otonomi Khusus mungkin telah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk melihat apakah kedua model memiliki perbedaan maka dilakukan uji perbandingan dengan menggunakan *Hausman Test Model* antara Model A (kondisi khusus/kondisi dengan adanya Covid-19) dengan Model B (kondisi normal/kondisi tanpa adanya Covid-19), maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2 Perbandingan Model Menggunakan *Hausman Test* Pada Kondisi Dengan Covid-19 dan Kondisi Tanpa Covid-19 Kabupaten/Kota di Papua Provinsi

Perbandingan Model	<i>Hausman Test</i>	
	Prob>chi ²	Keterangan
Model 1A dengan Model 1B	0.0642 **	Perbedaan koefisien antara kedua model sistematis
Dengan Covid-19		
Model 1A dengan Model 2A	0.0003 ***	Perbedaan koefisien antara kedua model sistematis
Tanpa Covid-19		
Model 1B dengan Model 2B	0.2826	Perbedaan koefisien antara kedua model tidak sistematis

Sumber: Data diolah, 2025

Setelah dilakukan uji perbandingan dengan menggunakan *Hausman Test Model* antara Model A (kondisi khusus/kondisi dengan adanya Covid-19) dengan Model B (kondisi normal/kondisi tanpa adanya Covid-19), maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- Untuk model-model yang mencakup periode Covid-19, perbandingan (Model 1A dengan 2A) menunjukkan perbedaan koefisien yang sistematis, dengan tingkat signifikansi yang tinggi (Prob>chi² < 0.05). Ini mengindikasikan bahwa penambahan variabel-variabel baru dalam Model 2A, secara signifikan mengubah estimasi koefisien dibandingkan dengan Model 1A, menyiratkan bahwa model-model yang lebih kompleks ini mungkin lebih tepat untuk menjelaskan data selama periode pandemi Covid-19.
- Di sisi lain, untuk model-model tanpa Covid-19, hasilnya lebih bervariasi menunjukkan perbedaan koefisien yang sistematis (Prob>chi² = 0.0008), namun perbandingan Model 1B dengan 2B tidak menunjukkan perbedaan yang sistematis (Prob>chi² > 0.05). Ini menyiratkan bahwa untuk periode tanpa

- Covid-19, penambahan Dana Otonomi Khusus (Model 2B) atau kombinasi keduanya (Model 4B) tidak menghasilkan perbedaan yang sistematis.
- 3) Perbedaan hasil ini antara model dengan dan tanpa Covid-19 menunjukkan bahwa pandemi mungkin telah mengubah dinamika ekonomi, menyebabkan variabel-variabel tambahan menjadi lebih relevan dalam menjelaskan variasi data selama periode tersebut.

Pembahasan

- 1) Besarnya Tingkat Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi (Konvergensi) Antar Wilayah Di Provinsi Papua
- Pada model Regresi Linier I, dilakukan perhitungan kondisi konvergensi absolut (*Absolute Convergence*). Konvergensi absolut merupakan konsep dalam ekonomi yang merujuk pada teori bahwa wilayah-wilayah dengan tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah akan tumbuh lebih cepat daripada wilayah-wilayah dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya pendapatan per kapita antar wilayah tersebut akan menjadi. Dari hasil estimasi analisis data menggunakan *Fixed Effect Model* diperoleh hasil sebagai berikut :
- a) Model 1A (dengan Covid-19)
- Terjadi kondisi yang konvergen (konvergensi) dan signifikan, hal ini ditunjukkan dengan besarnya β_1 yang bernilai negatif (-2,966). Artinya bahwa kabupaten/kota di Provinsi Papua yang memiliki PDRB per kapita lebih rendah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan PDRB per kapita lebih tinggi secara signifikan. Konvergensi ini menunjukkan bahwa adanya proses mengejar ketertinggalan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua.
- b) Model 1B (tanpa Covid-19)
- Terjadi kondisi yang konvergen (konvergensi) ditunjukkan dengan besarnya β_1 yang bernilai negatif (-2,789). Artinya bahwa kabupaten/kota di Provinsi Papua yang memiliki PDRB per kapita lebih rendah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan PDRB per kapita lebih tinggi. Ini menunjukkan adanya proses "mengejar ketertinggalan" atau konvergensi ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Papua.
- c) Perbandingan Hasil Estimasi Model 1A (dengan Covid-19) dan Model 1B (tanpa Covid-19)

Hasil analisis *Fixed Effect Model* memperlihatkan bahwa pada model 1A (kondisi dengan Covid-19) \ln pendapatan per kapita sebesar -2.966 dan model 1B (kondisi tanpa Covid-19) \ln pendapatan per kapita sebesar -2.789 menunjukkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan konvergensi ekonomi antar daerah di Provinsi Papua, dengan indikasi bahwa proses konvergensi ini tetap berlangsung selama masa Covid-19 maupun selama masa tanpa adanya pandemi Covid-19.

Efek konvergensi sedikit lebih kuat selama periode/kondisi Covid-19 dibandingkan periode/kondisi tanpa Covid-19. Ini mungkin mengindikasikan bahwa pada periode pandemi Covid-19 memiliki dampak yang relatif lebih besar pada Kabupaten/kota di Provinsi Papua dibandingkan periode tanpa Covid-19. Hal ini terjadi karena pada awal periode/kondisi Covid-19 seluruh daerah di Provinsi Papua mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi karena adanya pembatasan dan penutupan wilayah, sehingga seluruh aktivitas perekonomian berjalan dengan lambat (pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi melambat dan pertumbuhan ekonomi yang rendah tetap melambat). Dan daerah yang bertumbuhan ekonominya tinggi yang akan berasakan dampak besar dari adanya Covid-19.

Jika dihubungkan dengan pandemi Covid-19, daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke) adalah daerah-daerah yang paling parah terinfeksi Covid-19, sedangkan daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya rendah (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya) adalah daerah yang lebih sedikit terinfeksi Covid-19.

- 2) Peranan Dana Otonomi Khusus Terhadap PDRB Dalam Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pertumbuhan (Konvergensi) Di Provinsi Papua

Pada model Regresi Linier II, dilakukan perhitungan kondisi konvergensi Kondisional (*Conditional Convergence*). Konvergensi kondisional merupakan konsep dalam ekonomi yang merujuk pada teori bahwa wilayah-wilayah dengan tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah-wilayah dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan didukung dengan faktor lain, sehingga pada akhirnya pendapatan per kapita antar wilayah tersebut akan menjadi konvergen (mendekati satu sama lain) dalam jangka panjang.

a) Model 2A (dengan Covid-19)

Dari hasil estimasi diperoleh bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan adanya kondisi yang konvergen (konvergensi) ditunjukkan dengan besarnya β_1 yang bernilai negatif (-3,510). Artinya bahwa dengan adanya tambahan variabel dana otonomi khusus pada kondisi dengan adanya Covid-19, kabupaten/kota di Provinsi Papua yang memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan PDRB per kapita lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa adanya proses mengejar ketertinggalan atau terjadinya konvergensi ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Dana Otsus memiliki dampak positif dan signifikan (0.0296) terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, dana otsus khusus lebih efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong terjadinya konvergensi.

b) Model 2B (tanpa Covid-19)

Dari hasil estimasi diperoleh bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi serta adanya kondisi konvergen (konvergensi) ditunjukkan dengan besarnya β_1 yang bernilai negatif (-2,521). Artinya bahwa kabupaten/kota di Provinsi Papua yang memiliki PDRB per kapita lebih rendah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan PDRB per kapita lebih tinggi. Ini menunjukkan adanya proses "mengejar ketertinggalan" atau konvergensi ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Peranan dana otonomi khusus pada kondisi tanpa Covid-19 memiliki koefisien negatif (-0.0123) namun tidak signifikan secara statistik. Ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi normal (tanpa periode Covid-19), dampak dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipastikan.

c) Perbandingan Hasil Estimasi Model 2A (dengan Covid-19) dan Model 2B (tanpa Covid-19)

Dari hasil estimasi konvergensi kondisional dengan adanya tambahan variabel dana otonomi khusus, kedua model menunjukkan adanya konvergensi ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien negatif dan signifikan pada $\ln_{-}PDRB$ per kapita yaitu untuk periode dengan Covid-19 (-3.510) dan untuk periode tanpa Covid-19 (-2.521). Dan jika dibandingkan antara kondisi dengan Covid-19 dan kondisi tanpa Covid-19, tingkat konvergensi malah lebih tinggi pada saat kondisi Covid-19. Artinya bahwa disaat kondisi Covid-19, pemberian dana otonomi khusus membantu daerah-daerah dengan PDRB per kapita lebih rendah untuk tumbuh lebih cepat sehingga mempercepat proses konvergensi ekonomi antar daerah. Dampak Dana Otonomi khusus dari kedua kondisi adalah:

a) Dengan Covid-19 (Model 2A)

Dana Otonomi khusus memiliki dampak positif dan signifikan (0.0296) terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa selama pandemi, Dana Otonomi khusus efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Tanpa Covid-19 (Model 2B)

Dana Otsus memiliki koefisien negatif (-0.0123) namun tidak signifikan secara statistik. Ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi normal, dampak dana Otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipastikan.

Koefisien dalam Model 2A signifikan pada level 1%, sementara pada Model 2B, hanya $\ln_{-}PDRB$ per kapita yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa hasil untuk periode Covid-19 lebih dapat diandalkan.

Nilai R-squared sedikit meningkat dibandingkan model konvergensi absolut (Model 1A dan 1B), menunjukkan bahwa penambahan variabel Dana Otsus meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi, terutama selama periode Covid-19. Model 2A (dengan Covid-19) memiliki R-squared yang sedikit lebih tinggi (0.163) dibandingkan Model 2B (0.155), menunjukkan bahwa model ini lebih baik dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi selama periode pandemi.

Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa pentingnya dana otonomi khusus sebagai instrumen kebijakan, terutama dalam menghadapi guncangan ekonomi seperti pada masa pandemi Covid-19.

3) Uji Beda Tingkat Konvergensi : *Housman Test Model*

Hasil ini analisis mengindikasikan adanya perbedaan sistematis antara model dengan Covid-19 (1A) dan model tanpa Covid-19 (1B). Perbedaan sistematis menjelaskan bahwa perbedaan yang terjadi disebabkan karena kondisi dengan adanya Covid-19 sangat berpengaruh pada model yang akan digunakan. Artinya bahwa model pada kondisi dengan adanya Covid-19 (1A) lebih cepat konvergensinya dibandingkan dengan model tanpa adanya Covid-19 (1B) walaupun terjadi konvergensi akan tetapi agak lambat.

a) Perbedaan Kondisi Dengan Covid-19 Pada Model 1A (-2,966) dengan Model 2A (-3,510), $Prob.chi^2 = 0.0003***$ (Perbedaan koefisien antara kedua model sistematis)

Hasil analisis memperlihatkan bahwa setelah adanya tambahan variable dana otonomi khusus pada saat kondisi Covid-19, nilai pendapatan per kapita PDRB lebih besar dibandingkan sebelum adanya dana otonomi khusus. Artinya bahwa dana otonomi khusus mempengaruhi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat dan mempercepat terjadinya konvergensi (konvergensi lebih cepat terjadi).

Pada awal masa pandemi Covid-19 semua kabupaten/kota di Provinsi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dengan adanya pemberian dana otonomi khusus pada masa pandemi Covid-19 akan lebih cepat terjadinya konvergensi.

Pemberian dana otonomi khusus pada masa pandemi Covid-19 lebih mempercepat terjadi konvergensi disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah bahwa dana otsus khusus dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tedampak Covid-19

- b) Perbedaan Kondisi Tanpa Covid-19 Pada Model 1B (-2.789) dengan Model 2B (-2.521), $Prob.chi^2 = 0.2826$ (Perbedaan koefisien antara kedua model tidak sistematis)

Hasil analisis memperlihatkan bahwa pada masa tanpa Covid-19 dan tanpa dana otonomi khusus pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan percepatan konvergensi lebih cepat terjadi. Sedangkan pada masa tanpa Covid-19 dan adanya tambahan dana otonomi khusus pertumbuhan ekonomi tetap terjadi tetapi dan konvergensi pun tetap terjadi akan tetapi lebih rendah/lebih lambat. Untuk perannya, dana otonomi khusus pada masa tanpa Covid-19 tidak memiliki pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kondisi konvergensi.

Kesimpulan

- 1) Hasil perolehan untuk persamaan regresi sederhana (Konvergensi absolut) antara Model 1A (dengan Covid-19) dengan Model 1B (tanpa Covid-19).
Kedua model menunjukkan adanya konvergensi absolut, karena koefisien \ln_PDRB per kapita negatif dan signifikan. Ini berarti bahwa kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan PDRB per kapita lebih rendah cenderung tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan (mengurangi ketimpangan). Tingkat signifikasinya sedikit lebih kuat pada periode dengan Covid-19 (-2.966) dibandingkan tanpa Covid-19 (-2.789)
- 2) Hasil perolehan untuk persamaan regresi berganda (Konvergensi kondisional) antara model 2A (dengan Covid-19) dengan Model 2B (tanpa Covid-19).
Kedua model menunjukkan bukti kuat adanya konvergensi ekonomi, ditunjukkan oleh koefisien negatif dan signifikan pada \ln_PDRB per kapita. Dengan adanya pemberian dana otonomi khusus, daerah-daerah dengan PDRB per kapita lebih rendah cenderung akan tumbuh lebih cepat. Kekuatan Konvergensi memberi efek konvergensi lebih kuat selama periode Covid-19 (-3.510) dibandingkan periode tanpa Covid-19 (-2.521).
- 3) Uji Beda Tingkat Konvergensi : *Housman Test Model*
 - a) Model 1A (-2,966) dengan Model 2A (-3,510)
Hasil analisis memperlihatkan bahwa setelah adanya tambahan variable dana otonomi khusus pada saat kondisi Covid-19, nilai pendapatan per kapita PDRB lebih besar dibandingkan sebelum adanya dana otonomi khusus. Artinya bahwa dana otonomi khusus mempengaruhi serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih meningkat dan mempercepat terjadinya konvergensi (konvergensi lebih cepat terjadi).
Pemberian dana otonomi khusus pada masa pandemi Covid-19 lebih mempercepat terjadi konvergensi disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah tentang *refocusing* penggunaan dana otonomi khusus untuk mendukung pemulihan kondisi pada saat Covid-19
 - b) Model 1B (-2.789) dengan Model 2B (-2.521)
Hasil analisis memperlihatkan bahwa setelah adanya tambahan variable dana otonomi khusus tanpa adanya Covid-19, nilai pendapatan per kapita PDRB lebih kecil jika dibandingkan sebelum adanya dana otonomi khusus. Artinya bahwa dana otonomi khusus tidak memiliki pengaruhnya terhadap kondisi konvergensi (konvergensi lebih lambat terjadi) dan juga tidak ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan (kondisi normal). Faktor penyebab tidak berpengaruhnya dana otonomi khusus pada masa pandemi Covid-19 salah satunya adalah tata kelola penggunaan dana otonomi khusus yang tidak efektif.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang diberikan kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Saran-saran tersebut disajikan berikut ini :

1) Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan konvergensi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan hanya terbatas menggunakan variabel dana otonomi khusus dan sektor pertambangan tanpa melihat variabel-variabel lain, sehingga perlu dilakukan penelitian yang sama dengan menggunakan variabel lain agar dapat melihat pertumbuhan ekonomi dan konvergensi kabupaten/kota di Provinsi Papua agar hasil penelitian tentang konvergensi lebih komprehensif. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang serupa maupun hampir serupa agar lebih memperkaya kajian untuk pembangunan daerah.

2) Saran untuk Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pengelolaan dana otonomi khusus lebih baik pada saat terjadinya kondisi dengan adanya Covid-19. Hal ini terjadi karena adanya pengelolaan dana otonomi khusus yang baik pada saat itu. Untuk itu disarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperbaiki tata kelola penggunaan dana otonomi khusus agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan konvergensi daerah akan terus terjadi.

Daftar Pustaka

- Adisasmita Rahardjo, 2013, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, 2008. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021, Papua Dalam Angka, Jayapura: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020, Jayapura: BPS
- Barro, R. J., 1991. *Economic Growth In A Cross Section Of Countries. European Journal of Political Economy.* 106(2), 407-442.
- Barro, Robert J., & Xavier Sala-i-Martin., 1992, *Convergence. Journal of Political Economy* 100 (The University of Chicago Press, 1992): 223-251.
- Bruno Theodoro Luciano, *Eu-Lac Inter-Regionalism During the Covid-19 Pandemic, Contexto Internacional* E20210004 Vol. 44(2) May/Ago 2022, 1 Of 19.
- Islami, Fitra Sari, 2018, Faktor-faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen Vol. 33 No. 1 Januari 2018, p-ISSN: 0854-1442, e-ISSN: 2503-446X.
- Jhinghan, ML. 2007. Ekonomi Pembangunan. Teori dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mankiw, N Greggory, 2007, Teori Makro Ekonomi, Jakarta, Erlangga.
- Licchetta, Mirko and Giovanni Mattozzi, *Convergence in GDP Per Capita In the Euro Area and The Eu at The Time of Covid-19, Intereconomics*, 2023, 58(1), 43-51 Jel: F00, O47, O52, Doi: 10.2478/le-2023-0012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Lembar Negara RI Tahun 2004. Nomor 125. Sekertariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perdasus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.
- Peridy, Nicolas., dan Bagoulla. Corinne., (2012) “*Regional Integration and Real Convergence: Evidence from MENA Countries*”, *Journal of Economic Integration*, XXVII (1).
- Purwaningrum, A. P., 2017, *Analisis Konvergensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Sala-i-Martin, Xavier X., 1996, *The Classical Approach to Convergence Analysis. The Economic Journal*, 106 (437), 1019-1036.
- Samsuri, R.R., 2018. Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Pada 33 Provinsi Di Indonesia Tahun 2008-2013. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.
- Tamberan, Y.W, at all, 2020, *Allocation of Special Autonomy Funds and Their Impacts on Regional Economic Inequality (Case Study in Papua Province in 2010-2018)*, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 473.